

Studi Alokasi Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Di Eks-Karesidenan Madiun

Hery Hermawan

Program Studi Akuntansi, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133

E-mail: hery84480@gmail.com

Abstract— *This study aims to determine the effect of the level of effectiveness, independence, and fiscal decentralization on capital expenditures in districts/ city of Madiun Residency both partially and simultaneously. The type of research is quantitative research. Data analysis used is multiple linear regression, t test, F test and coefficient of determination. The result of this study show that, 1. The level of effectiveness significantly effect on the allocation of capital expenditure in the districts/city of Madiun Residency. 2. The level of independence significantly affects on the allocation of capital expenditure in the districts/city of Madiun Residency. 3. The level of fiscal decentralization significantly affects on the allocation of capital expenditure in the districts/city of Madiun Residency. 4. The level of effectiveness, independence, and fiscal decentralization simultaneously affect on the allocation of capital expenditure in districts/city of Madiun Residency.*

Keywords—: level of effectiveness; independence; fiscal decentralization; capital expenditure.

I. PENDAHULUAN

Pada zaman globalisasi, bagian terpenting untuk menunjang segala aktivitas perusahaan adalah sumber daya manusia. Keefektifan perusahaan agar tercapai target dipengaruhi oleh kualitas karyawan di perusahaan. Jika suatu organisasi pengelolaan sumber daya manusianya tidak didukung dengan baik, maka organisasi tersebut akan kesusahan ketika mencapai target organisasi. Pengelolaan SDM yang baik adalah suatu kewajiban bagi perusahaan agar dapat berkembang. Agar perusahaan tetap berjalan dengan optimal apabila terjadi perubahan lingkungan, perusahaan haruslah menitikberatkan pada sumber daya manusia (human resources). Sumber daya manusia yang efektif mampu memicu tingkat laku organizational citizenship behaviour (OCB), yakni perilaku melampaui tanggung jawab karyawan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam organisasi atau sebuah perusahaan, individu tidak hanya dituntut untuk melakukan perilaku dalam peran, tetapi juga untuk melakukan perilaku di luar peran. Tindakan OCB termasuk bekerja secara sukarela untuk tambahan tugas, menolong orang lain, mematuhi prosedur serta aturan perusahaan. Perilaku karyawan tersebut memperlihatkan bagaimana karyawan tersebut dapat memiliki inisiatif dan kepekaan dengan keadaan perusahaan.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, yang membutuhkan pendapatan, alam wilayah pemerintah daerah dikenal ada pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah menentukan skala prioritas pembangunan yang optimal, bila pendapatan daerah sedikit tentu skala prioritas dalam pembangunan tidak bisa optimal karena tidak bisa menjalankan banyak program pembangunan. Sehingga pendapatan daerah perlu ditingkatkan untuk pembangunan daerah yang optimal. Selain pendapatan daerah yang perlu dimaksimalkan, adanya pembagian alokasi belanja terhadap pembangunan menjadi hal yang sangat penting, belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Salah satu bagian belanja yaitu belanja modal akan menentukan seberapa besar pembangunan dapat dilaksanakan.

Kualitas pelaksanaan otonomi daerah memerlukan pengembangan kapasitas daerah baik dalam hal regulasi, sistem dan sumber-sumber pendanaan di daerah. Daerah harus dapat mengidentifikasi dengan tepat kapasitas yang dimilikinya untuk dapat menghasilkan berbagai kemajuan-kemajuan yang diharapkan. Salah satu aspek untuk melihat perkembangan daerah pemekaran yaitu melalui pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari hal ini akan terlihat apakah terjadi perubahan atau kemajuan yang signifikan pada suatu daerah setelah dimekarkan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai transparansi dan akuntabilitas publik serta memenuhi prinsip Value for money. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD.

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menurut Halim (2007) yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah serta rasio keserasian. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sumber daya keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar criteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Susantih dan Saftiana, 2010). Dengan demikian masalah keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus

rumah tangga daerah karena merupakan indikator kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Mengukur kinerja keuangan penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dalam merealisasikan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memaksimalkan potensi daerahnya melalui pendapatan asli daerah, serta mampu mengelola keuangan untuk melaksanakan berbagai belanja daerah.

Masalah dari penelitian ini adalah yaitu apakah ada pengaruh tingkat efektivitas, kemandirian dan desentralisasi fiskal terhadap belanja modal di Pemerintah Daerah eks-Karesidenan Madiun. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh tingkat efektivitas, tingkat kemandirian, tingkat desentralisasi fiskal terhadap belanja modal di Pemerintah Daerah eks-Karesidenan Madiun

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yaitu metode yang akan melihat signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Sampel penelitian ini adalah lapoan keuangan se-Karesidenan Madiun tahun 2012-2017

B. Definisi Operasional Variabel

1. Kemandirian daerah

Analisis kemandirian daerah menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2007). Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Rasio kemandirian daerah diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Ratio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Efektifitas PAD

Efektivitas PAD adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas PAD diukur selama dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

3. Ketergantungan keuangan/Fiskal

Ketergantungan keuangan/Fiskal dihitung dengan menggunakan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi. Ketergantungan daerah diukur selama tiga tahun dengan menggunakan rumus :

$$\text{Ketergantungan keua} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

C. Jenis, Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data documenter yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber-sumber lainnya. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Tehnik pengumpulan data pada penilitian ini dilakukan dengan penelusuran data sekunder dengan kepustakaan dan manual. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan data-data yang diperlukan. Data-data ini diperoleh dari di www.bpk.go.id yang merupakan *website/* situs resmi BPK.

D. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali 2016:154). Untuk mendeteksi normalitas dapat digunakan uji non parametrik *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Data berdistribusi normal apabila signifikan lebih dari 0,05.

b. Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali 2016:103). Uji multikolonieritas dilakukan dengan menggunakan uji *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka dapat dikatakan bebas dari multikolonieritas.

- c. Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali (2016:107) *Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya)*, penelitian ini menggunakan Runs Test.
- d. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali 2016-139). Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas dilihat berdasarkan gambar *Scatterplot*. (Ghozali 2016-139).

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y) (Ghozali 2013:96). Seberapa besar variabel independen memberi pengaruh terhadap variabel dependen bisa dihitung dengan menggunakan persamaan garis regresi linier berganda berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = belanja modal

α = Konstanta

β_{1-3} = Koefisien Regresi

X_1 = Tingkat Efektivitas

X_2 = Tingkat Kemandirian

X_3 = Tingkat Desentralisasi Fiskal

ϵ = Error

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil penelitian, yang sudah diolah dengan menggunakan program SPSS versi 24 kemudian dianalisis dan diuraikan sebagai berikut.

A. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan program SPSS 24, diperoleh hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	[7] 57.15603583
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.067
	Negative	.088
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi yang sangat kuat antar variabel bebas. Hasil analisis uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel be

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)	[21]	[22]
Efektivitas	.881	1.136
Kemandirian	.790	1.266
Desentralisasi	.801	1.249

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua variabel tidak ada yang mempunyai nilai VIF yang lebih besar dari 10 dan tidak ada yang mempunyai nilai *tolerance* kurang dari 0,1. Jadi dapat dikatakan bahwa model dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

3. Autokorelasi

Dalam penelitian ini, untuk menguji autokorelasi digunakan uji *Runs Test*.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
[33]	Unstandardized Residual
Test Value ^a	1.63270
Cases < Test Value	18
Cases >= Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	13
Z	-1.860
Asymp. Sig. (2-tailed)	.063

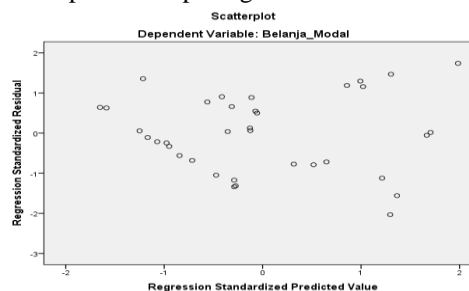
a. Median

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas diketahui nilai asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,063. Nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Jadi karena signifikansi ($0,063 > \alpha (0,05)$), maka dapat disimpulkan bahwa dalam model persamaan tidak terdapat autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *scatter plot*. Hasil analisis uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah

Dari gambar diatas terlihat titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Jadi dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel penelitian ini.

B. Pengujian Hipotesis

1. Regresi Linier Berganda

Hasil analisis uji regresi linier berganda sebagai berikut :

Tabel 4. Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-113.278	36.662	[.56]	-3.090	.004
Efektivitas	.620	.207	.317	2.995	.005
Kemandirian	.676	.226	.335	2.997	.005
Desentralisasi	13.419	3.301	.451	4.066	.000

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = -113,278 + 0,620X_1 + 0,676X_2 + 13,419X_3$$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Konstanta (α) sebesar -113,278 berarti apabila tidak ada variabel tingkat efektivitas, tingkat kemandirian, dan tingkat desentralisasi fiskal, maka belanja modal kabupaten/kota eks-Karesidenan Madiun sebesar -113,278.
- Koefisien variabel tingkat efektivitas (X_1) sebesar 0,620. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut adalah searah, artinya apabila tingkat efektivitas naik sebesar satu satuan, maka belanja modal kabupaten/kota eks-Karesidenan Madiun akan naik sebesar 0,620, dengan catatan variabel tingkat kemandirian (X_2) dan tingkat desentralisasi fiskal (X_3) konstan.
- Koefisien variabel tingkat kemandirian (X_2) sebesar 0,676. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut adalah searah, artinya apabila tingkat kemandirian naik sebesar satu 0,676 satuan, maka belanja modal kabupaten/kota eks-Karesidenan Madiun akan naik sebesar 0,676, dengan catatan variabel tingkat efektivitas (X_1), dan tingkat desentralisasi fiskal (X_3) konstan.
- Koefisien variabel tingkat desentralisasi fiskal (X_3) sebesar 13,419. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut adalah searah, artinya apabila tingkat desentralisasi fiskal naik sebesar satu satuan, maka belanja modal kabupaten/kota eks-Karesidenan Madiun akan naik sebesar 13,419 satuan, dengan catatan variabel tingkat efektivitas (X_1) dan tingkat kemandirian (X_2) konstan.

2. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial. Hasil analisis uji t dengan bantuan program SPSS release 24.0 seperti pada tabel 4.10 di atas. Dari tabel di atas diketahui:

- Nilai signifikansi variabel tingkat efektivitas adalah 0,005. Karena signifikansi $0,005 < 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya ada pengaruh tingkat efektivitas terhadap belanja modal di kabupaten/kota eks-Karesidenan Madiun.
- Nilai signifikansi variabel tingkat kemandirian sebesar 0,005. Karena signifikansi $0,005 < 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tingkat kemandirian berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota eks-Karesidenan Madiun.
- Nilai signifikansi variabel tingkat desentralisasi fiskal adalah 0,000. Karena signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya tingkat desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota eks-Karesidenan Madiun.

3. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara semua variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Hasil analisis uji F diperoleh nilai F hitung seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	248500.218	3	82833.406	3.183	.000 ^b
Residual	114338.427	35	32668.128		
Total	362838.645	38			

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena signifikansi $0,000 < 0,005$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh antarvariabel tingkat efektivitas, tingkat kemandirian, dan tingkat desentralisasi terhadap belanja modal kabupaten/kota eks-Karesidenan Madiun.

4. *Koefisien Determinasi (R²)*

Hasil analisis tentang koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut.

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R Square	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.828 ^a	.685	.655	59.77521307

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,685 atau 68,5%. Artinya secara bersama-sama variabel tingkat efektivitas, tingkat kemandirian, dan tingkat desentralisasi berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota eks-Karesidenan Madiun sebesar 68,5%. Sedangkan 31,5% dipengaruhi oleh variabel lain seperti PAD, DAU, dana bagi hasil dan lain-lain.

IV. PEMBAHASAN

A. *Pengaruh Tingkat Efektivitas Terhadap Belanja Modal*

Dari hasil analisis data diperoleh nilai t hitung untuk variabel tingkat efektivitas adalah 2,995 lebih besar dari t tabel = 2,03693 dan signifikansi $0,005 < 0,05$. Hal ini berarti pengaruh tingkat efektivitas terhadap belanja modal kabupaten/kota eks-Karesidenan Madiun bermakna atau signifikan pada taraf signifikan 95%. Dengan kata lain H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil penelitian ini berpengaruh positif, yang berarti semakin tinggi tingkat aktivitas maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ardhini, dan Handayani (2011) hasil penelitian menunjukkan rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Juga penelitian Febriany, Saerang, dan Pontoh (2012) hasil penelitian menunjukkan Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Undang-undang No. 32 tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Nugroho, (2010) peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Yustikasari dan Darwanto, (2007) juga mengemukakan bahwa peningkatan PAD akan memberikan dampak meningkatnya pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan alokasi belanja modal.

B. *Pengaruh tingkat kemandirian terhadap Belanja Modal*

Dari hasil analisis data diperoleh nilai t hitung untuk variabel tingkat kemandirian adalah 2,997 lebih besar dari t tabel = 2,03693 dan signifikansi $0,005 < 0,05$. Hal ini berarti pengaruh tingkat kemandirian terhadap belanja modal kabupaten/kota eks-Karesidenan Madiun bermakna atau signifikan pada taraf signifikan 95%. Dengan kata lain H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian maka semakin tinggi pula alokasi belanja modal.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto, (2011) menyatakan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut juga konsisten dengan apa yang dipaparkan oleh Harianto, dan Adi, (2007) bahwa tingkat kemandirian berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Saat ini, tingkat kemandirian daerah belum dapat menunjukkan kemajuan yang berarti bahkan bila melihat kondisi pemerintahan saat ini kemandirian daerah cenderung menurun. Adi (2007) dalam Utomo (2012), mengindikasikan kurang seriusnya daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan lebih mengandalkan penerimaan DAU yang bersifat hibah. Sebagai pertimbangan praktis, upaya ini lebih dipilih daripada meningkatkan PAD secara signifikan, sehingga sebagai konsekuensinya PAD yang diterima menjadi lebih kecil. Kondisi ini membuat kemandirian daerah semakin rendah.

C. *Pengaruh tingkat desentralisasi terhadap Belanja Modal*

Dari hasil analisis data diperoleh nilai t hitung untuk variabel tingkat desentralisasi fiskal adalah 4,066 lebih besar dari t tabel = 2,03693 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti pengaruh tingkat desentralisasi fiskal terhadap belanja modal kabupaten/kota eks-Karesidenan Madiun sangat bermakna atau signifikan pada taraf signifikan 95%. Dengan kata lain H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal maka belanja modal juga semakin meningkat.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Suwandi dan Tahar (2015) bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Juga penelitian yang dilakukan oleh Gunesti (2017) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Hal ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan dana dari pemerintah pusat. Besarnya nilai transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan, seharusnya menjadi insentif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan fungsinya, Pendapatan Asli Daerah merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan adanya desentralisasi fiskal (Rusydi, 2010 dalam Utomo, 2012). Kenyataan yang terjadi adalah dana transfer dijadikan sumber utama penerimaan daerah dibandingkan dengan PAD. Kondisi ini ditunjukkan dengan nilai PAD yang mampu dikumpulkan daerah tidak sebanding dengan besarnya dana perimbangan yang diterima daerah. Untuk memperbesar tingkat desentralisasi fiskal, pemerintah daerah harus berusaha untuk memperbesar PAD sehingga jumlah PAD sebanding atau bahkan melampaui dana perimbangan dari pemerintah pusat.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal di kabupaten/kota eks-Karesidenan Madiun.
2. Tingkat kemandirian secara signifikan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal di kabupaten/kota eks-Karesidenan Madiun.
3. Tingkat desentralisasi fiskal secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal di kabupaten/kota eks-Karesidenan Madiun.
4. Tingkat efektivitas, tingkat kemandirian, dan tingkat desentralisasi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal di kabupaten/kota eks-Karesidenan Madiun.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Penerimaan yang menjadi andalan pendapatan asli daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah harus memaksimalkan pajak dan retribusi. Bila hasil pajak dan retribusi daerah meningkat, maka hal ini akan memperkecil jarak antara PAD dan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Maka semakin kecil jarak tersebut, semakin mandiri pula suatu daerah.
2. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kemandirian daerah dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

C. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Periode penelitian antara tahun 2012 – 2017, sehingga belum tentu memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan kemandirian daerah. Bagaimanapun, dampak dari kebijakan desentralisasi ini akan lebih nyata bila menggunakan data dengan jangka waktu yang lebih lama.

VI. UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Merdeka Madiun, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz, Tanjung. 2006. *Akuntansi Keuangan Daerah Konsep Dan Aplikasi* Bandung: Alfabeta
- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala. Daerah Secara Langsung*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Arsa, I Ketut. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 S.D. 2013* Skripsi, Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Udayana
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik..* Yogyakarta : UPP STIM.
- Mahi, Raksa, 2005. "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia", Jurnal Manajemen Usahawan, Lembaga Management FE-UI, Jakarta.
- Perdana, Romi. 2016. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Dan Kalimantan* Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu | Perpustakaan.Upi.Edu
- Rofiah (2016) *Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kota/Kabupaten Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2014* . Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

- Sigit Hendrariyadi (2011) Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Antara Tahun 2008 – 2009, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- Siagian, Sondang P. 2001, *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi Dan Strategi*. Bina Aksara, Jakarta
- Singgih, Santoso. 2012. *Analisis SPSS Pada Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo.
- Suyono. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Susantih, Heny Dan Saftiana, Yulia. 2009. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se Sumatra Bagian Selatan..Simposium Nasional Akuntansi
- .Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Suliyanto. 2009, *Metode Riset Bisnis*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Andi
- Sugiyono. 2004. *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Keenam, Penerbit Alfabeta,. Bandung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah. 2006. Depdagri RI
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59, Tahun 2007 Tentang Pedoman Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2007. Depdagri RI.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
- Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.